

Analisis Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016-2020

Ahmad Fajri¹⁾, Agus Munandar²⁾

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul

Ahmad.fajri@esaunggul.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received: November 17, 2021

Accepted: November 31, 2021

Published: December 01, 2021

Keyword:

*Fiscal Autonomy Degree
Ratio, Independence Ratio,
PAD Effectiveness Ratio,
Regional Financial
Capacity, Regional
Financial Performance,
Routine Capacity Index
(IKR)*

Corresponding Author:

Ahmad Fajri

Agus Munandar

Ahmad.fajri@esaunggul.ac.id

Agus.munandar@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the capability and financial performance of the Tangerang City Government. Financial capability analysis is carried out using two approaches: Ratio Analysis of Fiscal Autonomy Degrees (DOF) and Routine Ability Index (IKR). Financial performance analysis is carried out using two approaches: Effectiveness Ratio Analysis of Regional Original Income (PAD) and the Independence Ratio. The results obtained are the ability and financial performance of the Tangerang City Government in the period 2016 to 2020 seen from the DOF Ratio, IKR Ratio, PAD Effectiveness Ratio, and Independence Ratio which significantly shows good results. With the ratio of Degrees of Fiscal Autonomy (DOF) it can be seen that Tangerang City's Original Regional Revenue (PAD) has sufficient ability to contribute to overall regional income. The IKR ratio shows that the Tangerang City Government has been able to finance its routine expenditures through Local Revenue. Through the Effectiveness ratio, it can be seen that the Tangerang City government has effectively succeeded in realizing its original regional revenue target. Finally, by using the independence ratio, it shows that the Tangerang City government has succeeded in having a high level of independence in terms of financing government activities, development, and services to the community.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kemampuan dan kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Tangerang. Analisa kemampuan keuangan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Analisa Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Analisa kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Analisa Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Kemandirian. Hasil yang didapatkan yaitu kemampuan dan kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2020 dilihat dari Rasio DOF, Rasio IKR, Rasio Efektifitas PAD, dan Rasio Kemandirian secara signifikan menunjukkan hasil yang baik. Dengan rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dapat terlihat Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Tangerang telah memiliki kemampuan yang cukup dalam berkontribusi pada pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio IKR menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang sudah mampu membiaya belanja rutusnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Melalui rasio Efektifitas terlihat pemerintah Kota Tangerang secara efektif telah berhasil merealisasikan target penerimaan asli daerahnya. Terakhir dengan menggunakan rasio kemandirian menunjukkan pemerintah Kota Tangerang berhasil memiliki tingkat kemandirian yang tinggi terkait pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

How to Cite:

Fajri, A., & Munandar, A. (2021). Analisis Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(2), 226-236 <https://doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/16.026>

PENDAHULUAN

JABODETABEK adalah akronim dari Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi yang merupakan kawasan metropolitan di sekitar Jakarta. Kota Tangerang terletak pada bagian timur Provinsi Banten dan menjadi Kota Terbesar di Provinsi Banten. Kota ini juga sekaligus menjadi Kota terbesar ketiga di JABODETABEK. Luas yang dimiliki Kota Tangerang yaitu kurang lebih 153,9 km². Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sisi Barat dan Utara, kemudian di sisi Selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan DKI Jakarta. Terdapat salah satu sungai terbesar Pulau Jawa yang melintasi Kota Tangerang dan sekaligus menjadi identitas Kota Tangerang itu sendiri yaitu Sungai Cisadane. Sungai yang letak hulunya berada di lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango, Bogor ini sudah menjadi bagian dari Kota Tangerang dan sangat melekat sehingga tidak bisa dipisahkan.

Provinsi Banten merupakan provinsi dimana Kota Tangerang berada. Kota

Tangerang hingga kini dipimpin oleh seorang walikota Bapak H. Arief Rachadiono Wismansyah, BSc., Mkes, bersama dengan wakil walikota Bapak Drs. H. Sachrudin. Terdapat sejumlah 1.742.604 jiwa yang tercatat sebagai penduduk Kota Tangerang dan tersebar pada 13 kecamatan (Batucaeper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, Tangerang) dan 104 kelurahan yang dipimpin oleh Bapak H. Arief Rachadiono Wismansyah, BSc., Mkes, selaku walikota Kota Tangerang (Tangerang, 2020). Sebelumnya Kota Tangerang adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, namun statusnya kini berubah dan meningkat menjadi kota administratif. Hingga akhirnya saat ini Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai kotamadya pada tahun 1993. Terdapat pergantian sebutan pada tahun 2001 yang sebelumnya Tangerang memiliki sebutan 'kotamadya', berubah sebutannya menjadi 'kota'. Berikut adalah demografi Kota Tangerang pada gambar 1.



Gambar 1: Demografi Kota Tangerang

Sumber: (tangerangkota.go.id, 2020)

Kota Tangerang tentunya memiliki tantangan yang tidak mudah untuk dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya, terlebih kota ini harus mampu bersaing dengan kawasan metropolitan lain di sekitar Jakarta yaitu Bogor-Depok-Bekasi. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang yang tercatat pada situs resmi Pemerintah Kota Tangerang yaitu sebesar 6,32% dan 5,32% secara nasional dengan pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 4,94 triliun rupiah yang ditargetkan (Tangerang, 2020). Seperti yang diatur dalam UU. No. 33 tahun 2004 yang pada intinya yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Beberapa bentuk praktek desentralisasi keuangan yaitu pendanaan mandiri, menjalin kerjasama pendanaan dengan pihak swasta untuk penyediaan pelayanan dan infrastruktur, perluasan sumber pendapatan daerah melalui berbagai retribusi, dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat, dan juga hutang luar negeri (Efriadi, 2012). Bagaimana Kota Tangerang yang bisa dikatakan sebagai kota kecil ini mampu untuk membiayai anggaran daerahnya sehingga tidak bergantung secara signifikan kepada pemerintahan Kabupaten Tangerang maupun Provinsi Banten. Penulis tertarik untuk meneliti

Kota Tangerang ini khususnya dalam kemampuan mengelola kemampuan keuangan dan kinerja keuangan daerahnya. Adanya pandemi Covid-19 hingga saat ini di Indonesia khususnya Kota Tangerang juga menjadi alasan lainnya bagi peneliti untuk menganalisa bagaimana kota ini bisa merespon dan beradaptasi secara cepat dimana segala sektor ikut terkena imbas kebijakan pemerintah pusat.

TINJAUAN TEORI

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau lebih singkatnya dikenal dengan APBD merupakan suatu bentuk pembuatan anggaran yang berisi rincian daftar dan dibuat secara sistematis. Anggaran ini memuat perencanaan Pemerintah daerah baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Pemerintah daerah yang dimaksud yaitu Pemerintah tingkat II kabupaten/kota, atau pemerintah daerah tingkat I atau provinsi. APBD menurut Permendagri No. 21/2011 adalah suatu agenda keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu setahun yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan peraturan daerah, termasuk tujuan APBD. Anggaran APBD ini disusun dengan

komponen penerimaan dan pengeluaran. Pemasukan APBN yaitu berasal dari: (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) dana alokasi umum (DAU), (3) dana alokasi khusus (DAK), dan (4) bagi hasil.

Dalam penyusunan APBD Kota Tangerang perlu diperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Dalam kurun waktu satu tahun pembuatan peraturan daerah merupakan kunci terbentuknya APBD. Pemimpin daerah harus mampu mengatasi masalah dan kesulitan utama yang muncul di daerahnya (Kamaludin *et al.*, 2021).

Kemampuan Keuangan daerah

Pada prinsipnya kapabilitas keuangan daerah adalah bagaimana daerah bisa membiayai sendiri atas anggaran yang telah disusun. Daerah dikatakan mampu berotomi apabila daerah bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya dan bisa diterjemahkan menjadi arus kas masuk untuk membiayai pos-pos belanja daerah. Selain itu Kemampuan Keuangan Daerah bisa didefinisikan sebagai pengelompokan suatu daerah berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah yang diatur menggunakan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Beberapa rasio dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja kemampuan daerah dapat dikatakan baik yaitu rasio DOF (Derajat Otonomi Fiskal) dan IKR (Indeks Kemampuan Rutin) (Sijabat & Dkk, 2014). Rasio DOF adalah melihat bagaimana PAD memiliki peran signifikan dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Sedangkan IKR bisa menunjukkan sejauhmana PAD berperan dalam proses belanja rutin. Anggraini (2015) membuktikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan otonomi daerah serta kinerja keuangan juga menunjukkan hasil yang positif.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pada prinsipnya memperlihatkan bagaimana pemerintah kota maupun kabupaten mampu menyusun anggaran penerimaan dan belanja daerah serta merealisasikannya secara signifikan. Semakin tinggi realisasi suatu daerah terhadap anggaran yang dimilikinya maka bisa dikatakan daerah tersebut memiliki kinerja yang baik. Pengukuran kinerja keuangan daerah bisa dilakukan dengan beberapa rasio diantaranya rasio Efektifitas penerimaan asli daerah dan rasio kemandirian. Rasio Efektifitas penerimaan asli daerah menunjukkan seberapa efektif penerimaan asli daerah yang telah direncanakan mampu direalisasikan

pendapatannya sedangkan rasio kemandirian menunjukkan seberapa mandiri PAD memiliki peranan dominan dibandingkan dengan penerimaan lainnya. (Mutiha, 2016) yang meneliti Pemerintah Kota Bogor telah membuktikan pola hubungan kemandirian daerah Kota Bogor yaitu menunjukkan pola hubungan konsultatif. Hal ini menunjukkan lebih dominannya peran pemerintah pusat dibanding pemerintah kota bogor.

METODE

Penulis melakukan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan faktual berdasarkan fakta dan sifat populasi tertentu. Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kota Tangerang khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2016-2020. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dimana peneliti mengunduh file dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang secara langsung.

Tahapan-tahapan analisis laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menghitung rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Berikut adalah formula yang digunakan untuk mendapatkan rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) pada penelitian ini:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1: Kategori Kemampuan Daerah

PAD/TPD (%)	KEMAMPUAN KEUANGAN	IKR (%)
0-10	Sangat Kurang	0-10
10-20	Kurang	10-20
20-30	Sedang	20-30
30-40	Cukup	30-40
40-50	Baik	40-50
> 50	Sangat Baik	> 50

Sumber: Munir, dkk (2004) dalam Sijabat, dkk (2014)

Tabel 1 memperlihatkan kategori kemampuan daerah dalam hal kemampuan keuangan.

2. Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Berikut formula yang dipakai untuk mendapatkan nilai Indeks Kemampuan Rutin (IKR) pada penelitian ini:

$$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100\%$$

Kategori kemampuan daerah dalam hal kemampuan keuangan yang dilihat dari nilai IKR mengacu pada tabel 1.

3. Menghitung Rasio Efektifitas Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Untuk dapat menghitung rasio Efektifitas penerimaan asli daerah Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2: Tingkat Efektifitas PAD

EFEKTIFITAS PENERIMAAN ASLI DAERAH	RASIO
EFEKTIF	> 100 %
BERIMBANG	= 100 %
TIDAK EFEKTIF	< 100 %

Sumber: Mahsun (2006) dalam Sijabat, dkk (2014)

Tabel 2 menunjukkan kategori Efektifitas keuangan daerah dilihat dari rasio Efektifitasnya.

4. Menghitung Rasio Kemandirian

Berikut formula untuk mengetahui besarnya Rasio Kemandirian suatu daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat \& Bantuan Lain}}$$

Tabel 3: Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

KEMAMPUAN KEUANGAN	RASIO KEMANDIRIAN (%)	POLA HUBUNGAN
RENDAH SEKALI	0-25	INSTRUKTIF
RENDAH	25-50	KONSULTATIF
SEDANG	50-75	PARTISIPATIF
TINGGI	75-100	DELEGATIF

Sumber: Purba (2012) dalam Sijabat, dkk (2014)

Tabel 3 menunjukkan kategori kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio kemandirian dan kategori pola hubungannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan Pemkot Tangerang

Berdasarkan data yang ada, diperoleh hasil kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai berikut:

Tabel 4: Rasio DOF Kota Tangerang Tahun 2016-2020

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO DOF	KEMAMPUAN KEUANGAN
2016	Rp 1,590,080,030,000	Rp 3,388,541,592,672	47%	Baik
2017	Rp 1,991,898,969,395	Rp 3,930,164,161,844	51%	Sangat Baik
2018	Rp 1,864,385,584,947	Rp 3,971,571,451,402	47%	Baik
2019	Rp 2,027,112,805,905	Rp 4,277,659,353,829	47%	Baik
2020	Rp 1,649,002,723,454	Rp 3,648,663,446,803	45%	Baik
Total	Rp 9,122,480,113,701	Rp 19,216,600,006,550	-	-
Rata-rata	Rp 1,824,496,022,740	Rp 3,843,320,001,310	47%	Baik

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang

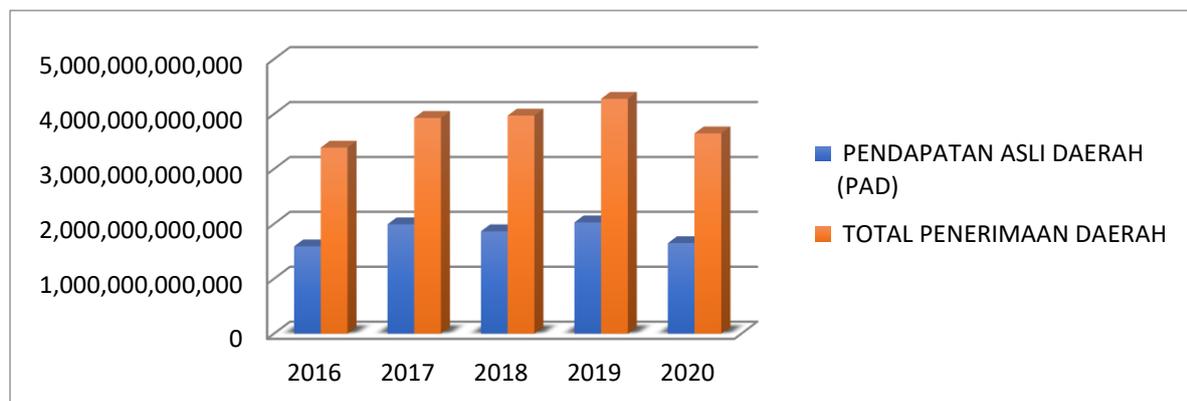
Pada tabel 4, terlihat rasio DOF Kota Tangerang pada rentang waktu 2016-2020 rata-rata stabil disetiap tahunnya dengan persentase sebesar 47%. Terlihat adanya peningkatan ditahun 2017 dengan persentase 51%, namun setelah itu kembali

mengalami penurunan menjadi 47% ditahun 2018-2019 dan menjadi 45% pada tahun 2020. Kenaikan dan penurunan rasio DOF tidak memperlihatkan nilai yang sangat signifikan dan masih masuk dalam kategori baik.

Terlihat nilai rata-rata rasio DOF tahun 2016-2020 yaitu sebesar 47% yang dapat disimpulkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Tangerang telah memiliki kemampuan yang cukup dalam memberikan sumbangan pada pendapatan daerah. Terlihat disetiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan kecuali tahun 2018 Rp. 1.864.385.584.947 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2017 sebesar Rp. 1.991.898.969.395,

serta tahun 2020 Rp. 1.649.002.723.454 yang lebih rendah dibanding tahun 2019 sebesar 2.027.112.805.905. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dibanding total penerimaan daerah, maka semakin menunjukkan kemandirian daerah tersebut dalam membiayai anggarannya sendiri dalam hal ini Kota Tangerang. Berikut adalah grafik PAD dan Penerimaan Daerah Kota Tangerang selama 5 tahun terakhir pada gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2: PAD dan Total Penerimaan Daerah Kota Tangerang

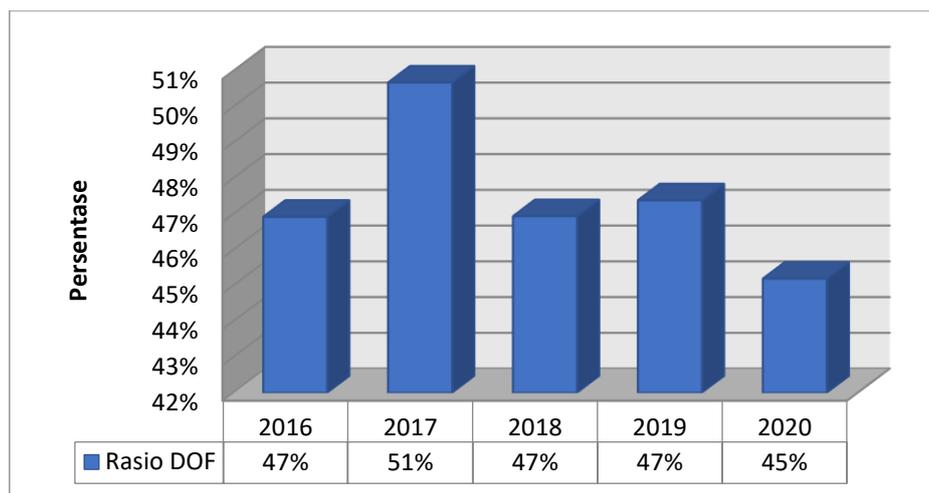


Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 2 memperlihatkan besarnya penerimaan asli daerah (PAD) dan Total Penerimaan Daerah Kota Tangerang pada tahun 2016 sampai 2020. Besarnya nilai rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yang merepresentasikan kemampuan keuangan

daerah Kota Tangerang apabila ditampilkan dalam diagram akan tampak sebagai berikut:

Gambar 3: Rasio DOF Kota Tangerang



Sumber: Data Diolah, 2021

Berikut hasil rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Tangerang selama tahun 2016 sampai 2020 yang telah didapatkan:

Tabel 5: Rasio Indeks Kemampuan Rutin Pemkot Tangerang Tahun Anggaran 2016-2020

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BELANJA RUTIN	RASIO IKR	KESIMPULAN
2016	Rp 1,590,080,030,000	Rp 2,759,008,840,295	58%	Sangat Baik
2017	Rp 1,991,898,969,395	Rp 2,879,668,155,698	69%	Sangat Baik
2018	Rp 1,864,385,584,947	Rp 3,261,827,364,218	57%	Sangat Baik
2019	Rp 2,027,112,805,905	Rp 3,429,688,543,026	59%	Sangat Baik
2020	Rp 1,649,002,723,454	Rp 3,147,357,742,439	52%	Sangat Baik
Total	Rp 9,122,480,113,701	Rp 15,477,550,645,676	-	-
Rata-Rata	Rp 1,824,496,022,740	Rp 3,095,510,129,135	59%	Sangat Baik

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang

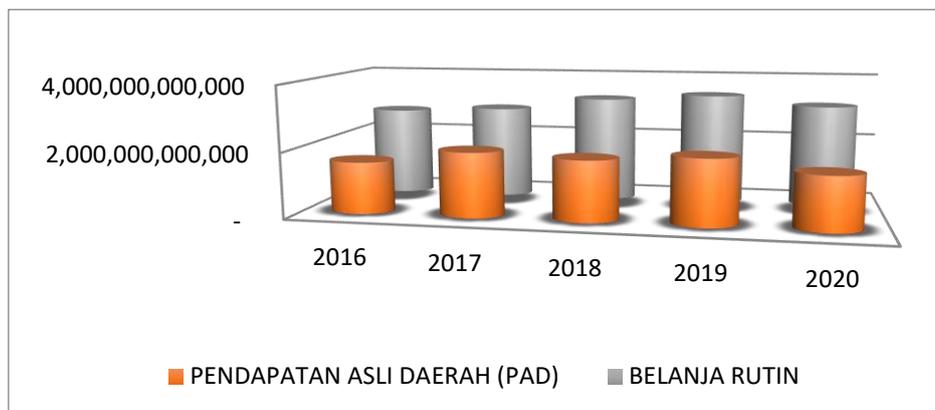
Pengukuran kemampuan daerah dapat dibandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Belanja Rutin. Tabel 5 memperlihatkan bahwa total belanja rutin Kota Tangerang disetiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang kemungkinan besar disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia. Dalam indeks kemampuan rutin (IKR) kategori sangat baik berada di persentase >50% yang artinya pendapatan asli daerah (PAD)

meskipun tidak 100% menutupi biaya belanja rutin pemerintah Kota Tangerang akan tetapi ketergantungan terhadap dana dari pihak lain termasuk pemerintah pusat tidak lebih dari 49%. Dalam 5 tahun terakhir IKR Kota Tangerang berada di persentase 59% dengan total PAD sebesar Rp. 9.122.480.113.701 dan belanja rutin sebesar Rp. 15.477.550.645.676 yang artinya belanja rutin pemerintah 59% menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya sebesar 41% menggunakan dana dari pihak lain.

Secara keseluruhan Kota Tangerang dilihat dari data yang ada dapat diartikan mampu menjalankan pemerintahannya sebagai daerah otonom dengan selalu menjaga rasio diatas 50%. Apabila ditampilkan dalam

diagram akan tampak sebagai berikut nilai PAD dan Belanja rutin Pemerintah Kota Tangerang selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai 2020:

Gambar 4: PAD dan Belanja Rutin Pemerintah Kota Tangerang

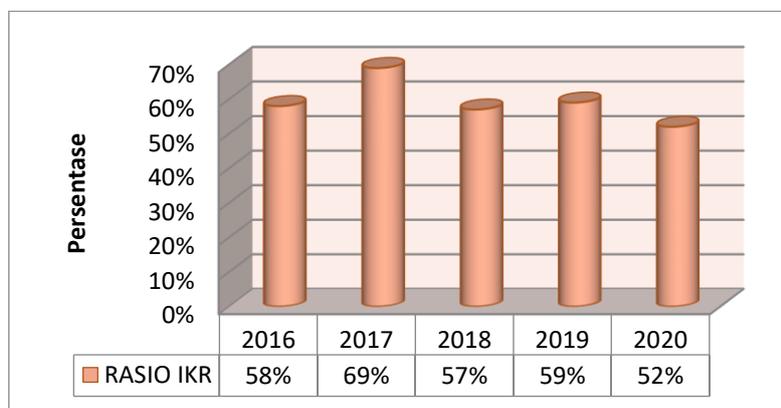


Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 4 memperlihatkan besarnya penerimaan asli daerah (PAD) dan Belanja Rutin Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2016 sampai 2020. Kinerja keuangan

Pemkot Tangerang dilihat dari rasio IKR apabila ditampilkan dalam diagram akan tampak sebagai berikut:

Gambar 5: Rasio IKR Kota Tangerang



Sumber: Data Diolah, 2021

Kinerja Keuangan Pemkot Tangerang

Kinerja keuangan daerah menurut Anggraini (2015) dapat diukur dengan menggunakan dua rasio yaitu Rasio Efektifitas PAD dan rasio kemandirian. Rasio Efektifitas PAD merefleksikan

kesanggupan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh pendapatan asli yang berpotensi bisa dikumpulkan sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditetapkan. Apabila rasio lebih dari 100% maka daerah

bisa dikatakan telah efektif mengumpulkan pendapatan asli daerahnya sedangkan apabila rasio berada kurang dari 100% maka bisa dipastikan daerah tersebut tidak berhasil mewujudkan rencana pendapatan asli daerahnya.

Rasio kemandirian mentikberatkan bagaimana Pemkot dalam menjalankan roda kegiatan pemerintahan khususnya pembangunan dan pelayanan kepada

disimpulkan daerah tersebut kesulitan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri.

masyarakat dilakukan dengan biaya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun daerah lain ataupun pinjaman lainnya. Dikatakan semakin tinggi rasio kemandirian artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak lain terutama pemerintah pusat maupun provinsi akan semakin kecil. Sebaliknya, apabila rasionya rendah artinya tingkat ketergantungannya tinggi dan bisa

Tabel 6: Rasio Efektifitas PAD Pemkot Tangerang Tahun Anggaran 2016-2020

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TARGET PENERIMAAN	RASIO EFEKTIFI TAS PAD	TINGKAT EFEKTIFIT AS
2016	Rp 1,590,080,030,000	Rp 1,441,101,841,668	110%	Efektif
2017	Rp 1,991,898,969,395	Rp 1,659,256,959,534	120%	Efektif
2018	Rp 1,864,385,584,947	Rp 1,710,362,495,379	109%	Efektif
2019	Rp 2,027,112,805,905	Rp 2,195,868,939,559	92%	Tidak Efektif
2020	Rp 1,649,002,723,454	Rp 1,464,562,583,407	113%	Efektif
Total	Rp9,122,480,113,701	Rp 8,471,152,819,547	-	-
Rata-Rata	Rp1,824,496,022,740	Rp 1,694,230,563,909	108%	Efektif

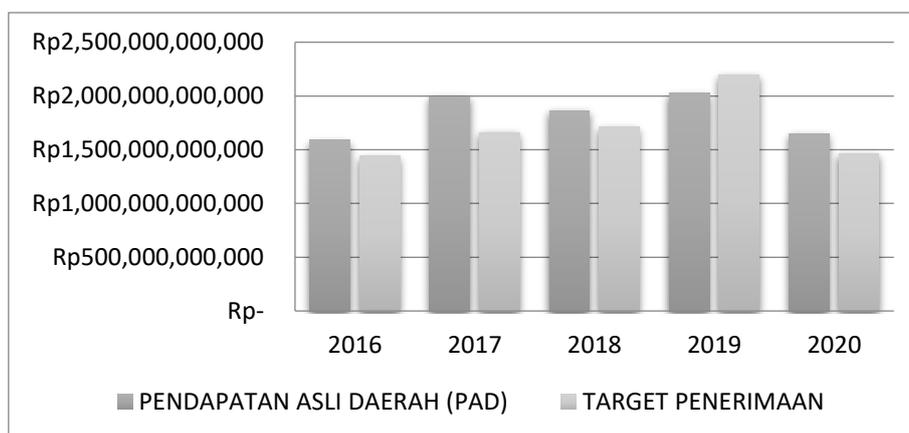
Dari tabel 6 terlihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya tahun 2019 saja rasio kemandirian dibawah angka 100%. Hal ini berarti pada tahun 2019 pemerintah Kota Tangerang tidak efektif dalam menghimpun Pendapatan asli daerahnya dibanding target penerimaannya. Penulis memperkirakan hal ini terjadi karena

pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia diawal tahun 2019 sehingga pemerintah Kota Tangerang masih menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Efektifitas tertinggi diraih pada tahun 2017 dimana mampu mencapai rasio 20% lebih tinggi dari PAD yang ditargetkan. Setelah tahun 2018 relatif menurun akan tetapi

masih dikisaran efektif dan ditahun 2020 kembali meningkat signifikan sebesar 21% menjadi 113%. Dari tabel ini terlihat Pemkot Tangerang sudah efektif dalam

merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Apabila ditampilkan dalam diagram akan tampak seperti berikut:

Gambar 6: PAD dan Target Penerimaan Pemerintah Kota Tangerang

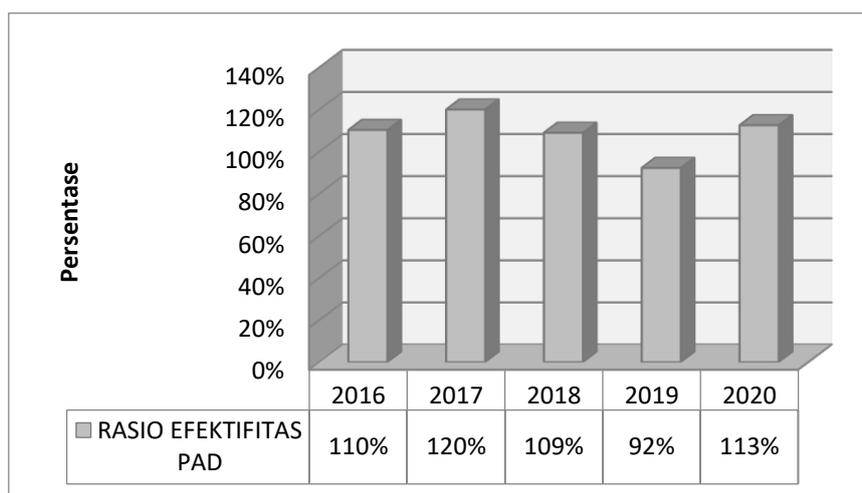


Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 6 memperlihatkan besarnya penerimaan asli daerah (PAD) dan Target Penerimaan Daerah Kota Tangerang pada tahun 2016 sampai 2020. Kinerja keuangan

Pemkot Tangerang dilihat dari rasio efektifitas PAD apabila ditampilkan dalam diagram akan tampak sebagai berikut:

Gambar 7. Rasio Efektifitas PAD Kota Tangerang



Sumber: Data Diolah, 2021

Berikut rasio kemandirian keuangan Pemkot Tangerang tahun 2016-2020:

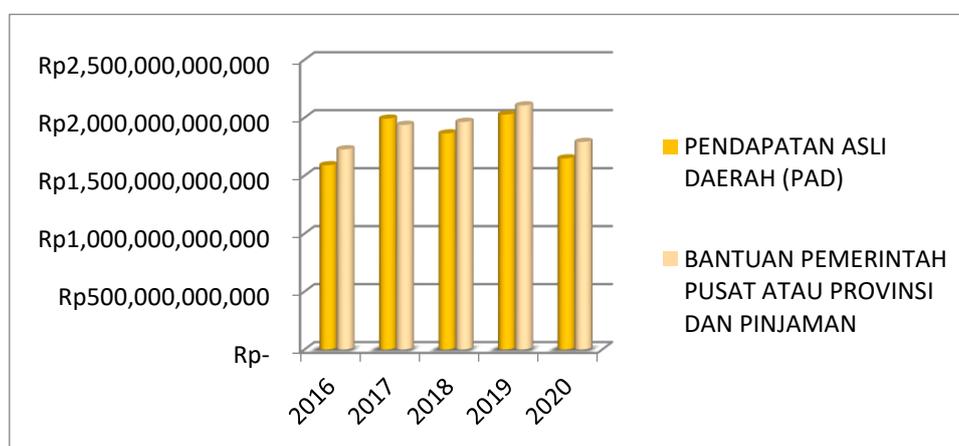
Tabel 7: Rasio Kemandirian Keuangan Pemkot Tangerang Tahun 2016-2020

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BANTUAN PEMERINTAH PUSAT ATAU PROVINSI DAN PINJAMAN	RASIO KEMANDIRIAN	TINGKAT KEMANDIRIAN
2016	Rp 1,590,080,030,000	Rp 1,727,508,039,972	92%	Tinggi
2017	Rp 1,991,898,969,395	Rp 1,938,265,192,449	103%	Tinggi
2018	Rp 1,864,385,584,947	Rp 1,964,171,986,455	95%	Tinggi
2019	Rp 2,027,112,805,905	Rp 2,106,120,187,924	96%	Tinggi
2020	Rp 1,649,002,723,454	Rp 1,791,519,383,349	92%	Tinggi
Total	Rp 9,122,480,113,701	Rp 9,527,584,790,149	-	-
Rata-Rata	Rp 1,824,496,022,740	Rp 1,905,516,958,030	96%	Tinggi

Dari tabel 7 terlihat bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Tangerang masuk dalam level tinggi (lebih dari 70%) bahkan di tahun 2017 mencapai presentase 103%. Secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir terjaga di level 96%. Hal ini menunjukkan pemerintah Kota Tangerang memiliki kemandirian yang tinggi, artinya

pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan bantuan yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi maupun bantuan hibah lainnya tidak berbeda jauh. Bahkan sempat lebih besar pada tahun 2017. Apabila ditampilkan dalam diagram akan tampak seperti berikut:

Gambar 8: PAD dan Bantuan Pemerintah Pusat Kota Tangerang

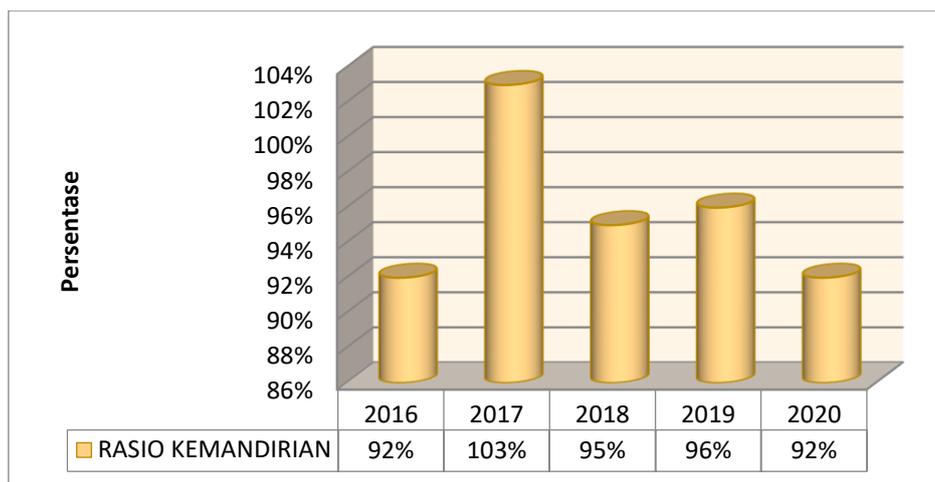


Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 8 memperlihatkan besarnya penerimaan asli daerah (PAD) dan Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman Daerah Kota Tangerang pada tahun 2016 sampai 2020. Tingkat

kemandirian keuangan Pemkot Tangerang dilihat dari rasio kemandiriannya apabila ditampilkan dalam diagram akan tampak sebagai berikut:

Gambar 9: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang



Sumber: Data Diolah, 2021

KESIMPULAN DAN SARAN

Adanya hasil penelitian beserta pembahasannya tentang kemampuan dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang, maka dapat disimpulkan kemampuan dan kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2020 yang diukur dengan Rasio DOF (Derajat Otonomi Fiskal), rasio IKR (Indeks Kemampuan Rutin), rasio Efektifitas PAD dan rasio Kemandirian secara signifikan menunjukkan hasil yang baik. Dengan rasio Derajat Otonomi Fiskal dapat dilihat Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota

Tangerang telah memiliki kemampuan yang cukup dalam memberikan sumbangan pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio IKR menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang sudah mampu membiayai belanja rutinnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Melalui rasio Efektifitas terlihat pemerintah Kota Tangerang secara efektif telah berhasil merealisasikan target penerimaan asli daerahnya. Terakhir dengan menggunakan rasio kemandirian menunjukkan pemerintah Kota Tangerang berhasil memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam mendanai segala aktivitas pemerintahan terutama pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D. (2015). Analisis Kemampuan Daerah, Tingkat Kemandirian Dan Efektivitas Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(1), 1–17.
- Efriadi, A. R. (2012). Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Membiayai Kegiatan Perekonomian. *Jurnal Liquidity*, 1(1), 23–31.
- Kamaludin, Arman, & Dunggio, S. (2021). Analisis Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–17.
- Mutiha, A. H. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2), 105–121. <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>
- Sijabat, M., dkk. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 236–242.
- Tangerang, P. K. (2020). *Pemerintah Kota Tangerang*. <https://www.tangerangkota.go.id>.

<http://abouttng.com/sejarah-kota-tangerang/>